

RINGKASAN

Analisis Beban Kerja Petugas Pelaporan Menggunakan Metode ABK-Kes di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Yolanda Yuresman, NIM G41220457, Tahun 2025, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Andri Permana W, SST., MT (Dosen Pembimbing), Dito Yogo Waskito, S.Tr.RMIK (Pembimbing Lapang).

Pelaporan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung manajemen rumah sakit, karena bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, hasil observasi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses pelaporan akibat tingginya beban kerja dan keterbatasan jumlah petugas. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Oleh karena itu, dilakukan analisis beban kerja menggunakan metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) untuk mengetahui kebutuhan ideal tenaga pelaporan.

Penelitian ini menggunakan metode *mix method* (kualitatif dan kuantitatif) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga orang petugas pelaporan. Berdasarkan hasil analisis, seluruh petugas memiliki latar belakang pendidikan D3 Rekam Medis yang telah sesuai dengan ketentuan PMK No. 55 Tahun 2013. Waktu kerja tersedia (WKT) dihitung sebesar 1.588,4 jam atau 95.304 menit per tahun, dengan rata-rata jam kerja efektif 28,5 jam per minggu.

Komponen beban kerja petugas pelaporan terdiri atas tugas pokok dan tugas penunjang. Tugas pokok mencakup penyusunan berbagai laporan internal maupun eksternal seperti laporan indikator mutu, laporan ke Dinas Kesehatan, laporan SIRS ke Kemenkes, laporan KB, serta sensus rawat jalan dan rawat inap. Sementara tugas penunjang meliputi kegiatan rapat, evaluasi unit, dan keikutsertaan dalam tim kerja HIV serta SKDR. Berdasarkan perhitungan, total Faktor Tugas Penunjang (FTP) sebesar 21,45% dan Standar Tugas Penunjang (STP) sebesar 1,27.

Hasil perhitungan Standar Beban Kerja (SBK) menunjukkan variasi antara 20,9 hingga 6.353,6 tergantung jenis kegiatan. Selanjutnya, diperoleh jumlah kebutuhan SDMK sebesar 3,97 yang dibulatkan menjadi 4 orang petugas. Saat ini unit pelaporan hanya memiliki 3 orang petugas, sehingga terdapat kesenjangan satu tenaga. Kekurangan ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan tingginya beban kerja individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas pelaporan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro belum seimbang dengan beban kerja yang ada. Diperlukan penambahan satu tenaga perekam medis agar pelaksanaan pelaporan dapat lebih optimal, tepat waktu, dan mendukung efektivitas manajemen data rumah sakit. Sebagai tindak lanjut, disusun usulan *Job Specification* bagi petugas pelaporan yang memuat persyaratan kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan unit.